

## PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL

### ACQUISITION COMMUNICATION PLANNING TOLL ROAD LAND

**Thiska Jennisa\*, Anuar Rasyid, Suyanto**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Koresponden email: [thiska.j@gmail.com](mailto:thiska.j@gmail.com)

#### ABSTRAK

Pengadaan tanah (pembebasan lahan) bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui I. Tahapan perencanaan komunikasi diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. II. Mengetahui pelaksanaan dan monitoring yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk menentukan khalayak sasaran komunikasi pada permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. III. Mengetahui hasil evaluasi dan pelaporan dalam penyelesaian konflik dari perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi Pembangunan dari Rogers (1985) dan menggunakan Konsep Perencanaan Komunikasi dari Canggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum memiliki 4 tahap yaitu sosialisasi, pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi. Dalam penentuan khalayak Dinas Pekerjaan Umum menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Melaksanakan sosialisasi, Melaksanakan Pendataan Awal, Melaksanakan Konsultasi Publik, Menyiapkan Penetapan Lokasi dan Mengumumkan Penetapan Lokasi (Penlok).

**Kata Kunci:** Jalan tol, komunikasi pembangunan, perencanaan komunikasi

#### ABSTRACT

*Land acquisition for development in the public interest is an unavoidable demand of any government. The purpose of this research is to find out I. The stages of communication planning applied by the Dinas Pekerjaan Umum of Riau Province in the construction of the Pekanbaru–Dumai toll road. II. Knowing the implementation and monitoring applied by the Provincial Dinas Pekerjaan Umum to determine the target audience of communication on the issue of land acquisition of the Pekanbaru–Dumai toll road construction site. III. Knowing the results of evaluation and reporting in conflict resolution from communication planning that has been implemented by the Riau Provincial Dinas Pekerjaan Umum in the problem of land acquisition of toll road construction sites in the Pekanbaru–Dumai area. The type of research that will be used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research uses the theory of Development Communication from Rogers (1985) and uses the Concept of Communication Planning from Canggara. The results of this study show that in communication planning the Dinas Pekerjaan Umum has 4 stages, namely socialization, data collection, public consultation and location determination. In determining the audience, the Dinas Pekerjaan Umum receives the Land Acquisition Planning Document, carries out socialization, carries out initial data collection, carries out public consultation, prepares location determination and announces location determination (Penlok). And in evaluating and resolving conflicts, a Study Team is formed, which will issue a letter of acceptance or rejection of objections to the location of the development plan.*

**Keywords:** Highway construction, development communication, communication planning

#### PENDAHULUAN

Padatnya lalu lintas pada wilayah Provinsi Riau memotivasi pemerintah daerah untuk membangun jalan alternatif agar menghindari padatnya lalu lintas yang saat ini semakin meningkat di kota Pekanbaru. Pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai memudahkan pemerintah dalam menunjang mobilitas akses pelaksanaan kinerja pemerintah dan mobilisasi masyarakat. Proyek Jalan Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131,5 km yang menghubungkan Pekanbaru (ibukota Provinsi Riau) dan Kota Dumai, yang

merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Pembangunan jalan tol Pekanbaru–Dumai merupakan salah satu tujuan penting pembangunan jalan tol di Riau. Proyek jalan tol sepanjang 129 kilometer ini telah membebaskan lahan sepanjang 39 kilometer. Pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp. 3,5 triliun untuk pembebasan lahan. Dalam tahap pembangunan tol Pekanbaru–Dumai tersebut banyak memiliki kendala-kendala terutama dalam pembebasan tanah sebagai lahan lokasi pembangunan jalan tol. Polemik pembebasan lahan yang selalu menjadi

permasalahan antara pihak pemerintah dan warga masyarakat khususnya yang berstatus kepemilikan tanah sangat berdampak dalam proses pembangunan.

Pada saat proses pembangunan ruas jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai banyak mengalami kendala. Dimana pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai merupakan proyek jalan tol perdana yang dibangun di Provinsi Riau. Bersumber dari pemberitaan media <https://finance.detik.com> yang terjadi dilapangan saat pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru dumai adanya kendala yang menyebabkan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih yaitu ada bidang lahan yang pembebasan atau ganti ruginya belum tuntas. Saat ini terdapat tiga area utama permasalahan lahan yaitu exit Tol Kandis Utara, Duri Selatan dan beberapa warga yang berada di Pinggir. Sedangkan untuk exit tol Kandis, hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap jadwal masuk jalan tol, karena gerbang tol di daerah tersebut belum dapat digunakan.

Tidak hanya itu, kendala saat proses tahun perencanaan dan tahun pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru-Dumai ini juga terdapat kendala lainnya yaitu rekanan yang masih belum ada karena setiap kegiatan pembangunan disetiap harus memiliki sponsor dana yaitu dari konsultan ataupun kontraktor yang badan usahanya masih dibawah negara Indonesia untuk agar lancarnya sebuah kegiatan pembangunan. Untuk memilikih rekanan tersebut tidak melalui proses lelang yang biasa dilakukan setiap oleh instansi Pekerjaan Umum baik di daerah ataupun di pusat. Rekanan dalam kegiatan pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru – Dumai langsung di tunjuk oleh bapak Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo yaitu PT.Hutama Karya. PT. Hutama Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol.

Permasalahan dalam pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai tentunya tidak lepas dari dampak komunikasi antar pemerintah dan situasi penguasaan lahan yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan perencanaan komunikasi yang baik agar permasalahan komunikasi dapat berujung pada solusi yang tepat. Masalah komunikasi adalah masalah yang disebabkan oleh tidak optimalnya komponen komunikasi dalam proses komunikasi. Tahap analisis masalah memerlukan pengumpulan informasi, fakta, dan keterangan mengenai situasi khalayak yang akan

digunakan sebagai bahan untuk menganalisis khalayak. Perumusan masalah harus didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya dari kelompok sasaran. Tujuan komunikasi adalah tujuan yang berkaitan dengan upaya mengubah perilaku sasaran setelah dilakukannya tindakan komunikasi.

Bagi sebuah organisasi, rencana memiliki fungsi yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan. Salah satu ciri organisasi atau individu yang visioner adalah memiliki rencana untuk menyongsong dan mempersiapkan masa depan. Setiap organisasi memiliki masalah yang berbeda dalam hal program komunikasi. Tidak ada rencana masa depan untuk program komunikasi yang akan diimplementasikan untuk mendukung kinerja institusi. Organisasi tanpa perencanaan yang matang cenderung mengikuti kegiatan organisasi lain, namun belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Bagi sebuah organisasi, rencana memiliki fungsi yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan. Salah satu ciri organisasi atau individu yang visioner adalah memiliki rencana untuk menyongsong dan mempersiapkan masa depan.

Sebagai instansi pelaksanaan perintah tugas Gubernur Riau, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam hal ini berupaya penyelesaian banyaknya permasalahan dalam pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru-Dumai dengan perencanaan komunikasi yang baik dan efektif. Untuk mencapai hasil yang tepat dalam mengimplementasikan sebuah program pembangunan, diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat. Rencana komunikasi bertujuan untuk mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai efektivitas komunikasi sekaligus dituntut oleh fungsi dan penggunaan rencana komunikasi untuk mengimplementasikan program yang ingin dicapai. Tahapan harus berjalan satu demi satu, tidak boleh meloncat-loncat.

Peran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam menyelenggarakan manajemen konflik masyarakat sangatlah strategis. Selain itu, keterampilan menguasai aspek-aspek komunikatif atau unsur-unsur pokok proses komunikatif dalam proses transmisi informasi/pesan secara umum melalui media komunikatif, terutama penggunaan bahasa lisan dan bahasa yang mengandung makna yang dapat dimengerti atau lambang-lambang yang sama pengertiannya atau abstrak. Menurut Ruslan (1999), unsur utama dari proses komunikasi adalah efek, pesan, saluran dan sumber. Unsur proses komunikasi ini dapat me-

nunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang menaungi proses sosialisasi di masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode analisis yang tidak menggunakan metode analisis statistik. Penelitian kualitatif merupakan studi yang teliti dan mendetail yang menggambarkan fenomena dari sebuah lingkungan sosial tertentu dan berupaya untuk menggambarkan sesuatu mengenai realitas di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh informan secara langsung dari tempat penelitian, berguna sebagai sumber analisis, dan relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Untuk melengkapi data pada penelitian ini maka yang menjadi sumber informasi dalam proses wawancara yaitu : 1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, 2) Tim Pelaksanaan Pembangunan Tol Ruas Wilayah Pekanbaru – Dumai Balai Kementrian PU PR di Wilayah Riau Daratan, 3) Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kota Dumai, 4) PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Pengembangan Jalan Tol Ruas Wilayah Pekanbaru–Dumai. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Tim Perencanaan dan Pelaksanaan tol Ruas wilayah Tol Pekanbaru–Dumai Kementrian PU PR dan Badan Pertanahan Provinsi Riau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembebasan lahan sebagai bagian dari pengembangan untuk kepentingan umum adalah sebuah kewajiban setiap pemerintah. Seiring dengan semakin berkembangnya suatu masyarakat, maka dibutuhkan lebih banyak ruang untuk kepentingan publik. Apabila hak kepemilikan individu (pribadi) berkonflik dengan kepentingan umum disebabkan koeksistensi antara negara dan masyarakat, maka kepentingan umum harus didahulukan. Dalam mengimplementasikan program pembangunan, dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan yang baik. Studi perencanaan komunikasi menggunakan berbagai model, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Tetapi harus diingat pula bahwa tahapan penggunaan suatu model dan implementasinya bergantung pada jenis atau tipe pekerjaan yang Anda lakukan. Sebenarnya tiada model yang dapat diterapkan secara universal, tetapi tergantung pada kondisi dan realitas yang ada.

## ***Perencanaan Komunikasi***

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah hal tak terelakkan bagi semua pemerintah. Semakin maju suatu masyarakat, maka dibutuhkan lebih banyak lahan untuk kepentingan publik. Agar negara dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, penyelesaian konflik antara hak milik individu (pribadi) dan kepentingan publik harus didahulukan. Pembebasan tanah oleh negara pada dasarnya dibagi menjadi (1) perencanaan, (2) persiapan, (3) pelaksanaan, dan (4) pencapaian hasil. Pada bagian kedua Rogers berpendapat bahwa komunikasi adalah dasar dari perubahan sosial. Oleh karena itu, peran komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan. Artinya, kegiatan komunikasi harus dapat diprediksi perkembangannya. Dalam konteks ini, peran dan fungsi komunikasi pembangunan adalah sebagai kegiatan pertukaran pesan dua arah antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari tahap persiapan, implementasi, dan evaluasinya.

## ***Tahap Sosialisasi***

Sosialisasi adalah proses pergaulan melalui komunikasi antar penduduk setempat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari komunikasi satu sama lain. Komunikasi yang terjadi memungkinkan adanya sosialisasi produk, institusi, peraturan, dan lain-lain, dan membuat mereka sadar akan hal tersebut melalui komunikasi kepada orang-orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut (Asmara, 2006). Dalam rencana komunikasi, otoritas bangunan berperan sebagai tim persiapan. Salah satu tugas persiapannya adalah melakukan kontak dengan masyarakat untuk mendukung PSN (Proyek Strategis Nasional).

Sosialisasi ditujukan agar masyarakat sadar akan dukungan terhadap PSN (Proyek Strategis Nasional) Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum menjadi tim persiapan untuk melakukan sosialisasi di daerah tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan mengenai PSN (Proyek Strategis Nasional) Jalan Tol Pekanbaru-Dumai secara langsung kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas memberikan sosialisasi telah menyediakan materi sosialisasi dengan bahasa yang baik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang awalnya belum memahami proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang diperkenalkan. Sedangkan untuk bahan presentasi, kami juga memberikan dukungan seperti membagikan pamflet

kepada masyarakat setempat agar lebih mudah dipahami.

Hal ini sejalan dengan teori komunikasi pembangunan (Rogers, 1976). Dalam teori ini, komunikasi dipandang sebagai kepanjangan tangan dari perencana pemerintah, dengan fungsi utama untuk memperoleh persetujuan dan partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan. Dari sudut pandang Rogers, terlihat jelas bahwa semua pembangunan di negara ini memainkan peran penting. Oleh karena itu, pemerintah, ketika memulai komunikasi, harus memperhatikan strategi-strategi penting apa yang dapat mereka gunakan untuk mengirimkan pesan-pesan mereka agar efek yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Dalam menyebarkan sosialisasi tentang pengadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai, Dinas Pekerjaan Umum juga memanfaatkan media massa untuk melakukan sosialisasi hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih luas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat seperti Youtube, Instagram, maupun berita online agar masyarakat tidak bingung dengan adanya petugas masuk ke perkarangan mereka. Tujuan media sosialisasi melalui media massa menjadi media sosialisasi yang paling efektif untuk membangun kepercayaan baru atau mempertahankan kepercayaan yang sudah ada. bahkan sosialisasi melalui media massa memiliki jangkauan lebih luas daripada media sosialisasi lainnya. Terpaan iklan yang ditayangkan di media massa sebagai contoh, ditengarai menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi, hingga gaya hidup masyarakat.

#### *Tahap Pendataan*

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi otentik tentang sesuatu, seperti orang, benda, lingkungan, atau peristiwa tertentu. Catatan ini dimaksudkan sebagai dokumen atau arsip untuk keperluan di masa yang akan datang. Tujuan utama yang biasanya mendahului pengumpulan data adalah pembuatan laporan. Penyusunan laporan dimaksudkan sebagai dasar atau pertimbangan penting untuk pengambilan keputusan oleh manajemen organisasi/perusahaan. Pengumpulan data juga merupakan pekerjaan persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pengadaan tanah dalam PSN Tol Pekanbaru-Dumai. Dinas Pekerjaan Umum pada tahap pendataan awal jalan Tol Pekanbaru-Dumai sebagai tim persiapan adalah melakukan sosialisasi pendataan awal kepada masyarakat dengan cara dikumpulkan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berhak dan juga

mengundang kepala desa, camat, dan toko masyarakat yang berada di daerah tersebut. Tujuan pendataan awal ini agar masyarakat tidak tekejut ketika petugas masuk ke perkarangan mereka.

Pendataan awal merupakan salah satu timeline pengadaan tanah yang dipegang oleh tim persiapan. Dalam proses pengadaan tanah pendataan awal adalah dengan melihat data yang terdapat pada dokumen perencanaan pengadaan tanah P2T, apabila data berbeda dengan fakta lapangan maka tim pengadaan tanah harus melakukan pendataan lagi karena data yang diambil ditahapan ini itu harus sesuai dengan faktual yang ada di lapangan. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan (Pasal 16 – Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2012).

Pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan tentu saja ditujukan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, kedudukan sebagai masyarakat menjadi salah satu posisi yang penting dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak dapat mewujudkan tujuan dengan menjauhi masyarakat setiap saat. Pembangunan dinilai berhasil apabila memberikan dampak perubahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan adalah proses negosiasi antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan mereka secara objektif (Hidayati, 2016)

#### *Tahap Konsultasi Publik*

Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BAB I

Ketentuan Umum). Dinas Pekerjaan Umum melakukan Konsultasi Publik dilakukan secara terbuka dengan cara mengundang masyarakat yang terkena PSN, Camat, RT/RW, toko adat setempat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Dinas Pekerjaan Umum ataupun masyarakat setempat. Penyebab konflik terjadi saat konsultasi publik adalah pada saat verifikasi pelaksanaan tanah milik warga terkena HPK (Hutan produksi). Dalam sebuah rencana komunikasi, Komunikator adalah pusat dan pengendali semua aktivitas komunikasi. Jadi, ketika sebuah proses penyampaian pesan tidak berhasil, maka hambatan terbesar terletak pada sang pembicara. Seorang komunikatorlah sebenarnya yang kurang memahami bagaimana cara menyiapkan isi materi, pemilihan sarana komunikasi yang tepat, serta cara menyampaikannya kepada kelompok sasaran. Seorang pemimpin komunikasi memegang kendali yang sangat penting dalam aktivitas berkomunikasi. Karena itu, komunikator yang mengomunikasikan program harus memiliki sifat komunikatif, imajinatif, dan creative.

Proses konsultasi publik akan dilakukan secara dialogis antara Departemen Pekerjaan Umum sebagai tim kesiapsiagaan dan pemangku kepentingan yang memenuhi syarat dan masyarakat yang terkena dampak. Implementasi dapat dilakukan oleh perwakilan resmi dari pihak yang memenuhi syarat. Pihak-pihak yang memenuhi syarat dan masyarakat yang terkena dampak atau perwakilan mereka akan diberi kesempatan untuk memberikan masukan/jawaban mengenai lokasi rencana pembangunan. Keberadaan penerima manfaat dan masyarakat yang berkepentingan, atau perwakilan mereka, akan dibuktikan dengan daftar hadir. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dalam konsultasi publik yang harus dicapai sangat penting dalam membangun partisipasi masyarakat dan juga menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik. Selain itu, hal ini juga merupakan tanda dari prinsip-prinsip kesetaraan, inklusi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan saling menghormati, yang memungkinkan pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah lebih cepat.

#### *Tahap Penetapan Lokasi*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mendefinisikan pengadaan tanah sebagai kegiatan menyediakan tanah bagi pihak yang berhak dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pihak

yang berhak adalah orang yang mengelola atau memiliki objek real estat. Pembebasan tanah dilakukan melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak atas tanah dan bukan dengan cara lain selain ganti rugi (Limbong, 2011). Perencanaan Tol Pekanbaru-Dumai adalah perencanaan awal penetapan lokasi di Provinsi Riau di karenakan provinsi Riau sebagai wilayah strategi yang bisa menjadi prioritas dan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatra sehingga banyak terbangun ruas tol. Selain itu pemilihan kota Dumai juga selain pembangunan juga sebagai akses meningkatkannya sektor Pariwisata di Provinsi Riau karena Kota Dumai sebagai alur alternative ke luar negeri melalui transportasi laut.

Pada dasarnya, pembebasan tanah terjadi melalui negosiasi antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah yang membutuhkan tanah untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2009). Setelah berlakunya UU No. 2/2012, prinsip konsultasi akan diwujudkan, antara lain, dalam kegiatan konsultasi publik dan kegiatan konsultasi penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi. Tim kesiapan Dinas Pekerjaan Umum kemudian akan memberitahukan kepada masyarakat di lokasi rencana zonasi. Hal ini dapat dilakukan secara langsung, seperti melalui media sosial, pengumuman/buletin, atau secara tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Pemberitahuan diberikan oleh walikota atau sebutan lain kepada masyarakat di lokasi pengembangan yang diusulkan dalam waktu tiga hari kerja setelah rencana pembebasan lahan diterima oleh lessor.

#### *Penentuan Khalayak Sasaran Komunikasi dan Penyelesaian Konflik*

Audiens adalah pihak yang menjadi target dari pesan yang dikirim oleh komunikator, dan audiens terdiri dari orang, kelompok, atau massa. Audiens target Anda berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga ketika menyampaikan pesan, Anda perlu menggunakan strategi untuk memastikan bahwa audiens target menerima pesan Anda. Kesadaran audiens adalah prinsip utama untuk kelancaran komunikasi (Kangala, 2008). Dalam menentukan target audiens komunikasi Dinas PU, Dinas PU akan menentukan target audiens melalui informasi geolokasi. Hal ini dikarenakan informasi geolokasi dicatat oleh pemerintah kota di negara yang terkena proyek PSN-nya. Dalam konsep perencanaan komunikasi (Hafied Cangara, 2013), masyarakat sasaran dari program komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan

energi yang Anda habiskan untuk mencoba mempengaruhi mereka, jika mereka tidak tertarik dengan program yang ditawarkan, upaya komunikasi yang dilakukan akan sia-sia (Canggara, 2013)

Proses pembangunan membutuhkan rencana dan strategi komunikasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi Pekerjaan Umum tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran, menginformasikan, dan mempengaruhi atau mengubah perilaku, tetapi juga untuk mendengarkan, mengeksplorasi, memahami, memberdayakan, dan melayani untuk perubahan. Komunikasi juga harus ditempatkan pada kemampuan untuk membangun konsensus dalam proses yang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Kesepakatan pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang setuju bahwa tanah mereka akan terkena dampak pembangunan adalah dengan membuat catatan mengenai hal tersebut. BAST adalah singkatan dari berita acara serah terima. Bukti ini dilampirkan sebagai salah satu proses untuk menyetujui penyerahan properti, pekerjaan, barang, atau hal lainnya (Mengie, 2021).

Sebagai tim persiapan pembebasan lahan, Dinas Pekerjaan Umum memiliki kesempatan untuk memediasi berbagai perselisihan yang melibatkan pembebasan lahan ganda. Penggunaan hak atas tanah asing oleh pemegang hak atas tanah dapat melalui pengalihan hak dalam bentuk jual beli atau pengalihan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah oleh pengguna tanah dapat dilakukan. Apabila terdapat kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, maka dapat dilakukan dengan cara jual beli atau pelepasan hak atas tanah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012). Dalam melaksanakan strategi komunikasi (Canggara, 2013), proses komunikasi yang dilakukan tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, sebuah perencanaan komunikasi bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi tercapainya efektivitas komunikasi, namun tetap mengacu pada fungsi dan kegunaan dari sebuah perencanaan komunikasi yaitu pembangunan infrastruktur. Hal ini telah dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dalam menyelesaikan sengketa pada tahap persiapan melalui konsultasi publik dan pada tahap pelaksanaan melalui arbitrase. Setiap tahap pembebasan lahan yang terkait dengan konflik dilakukan sesuai dengan mekanisme.

Pembebasan tanah dalam kerangka pembebasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk kepentingan umum membutuhkan kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang diklaim oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kenyataannya, para pemegang hak atas tanah dipaksa untuk mengalihkan atau memin-dahkan hak atas tanah mereka kepada pihak yang membutuhkan tanah, dengan alasan-alasan seperti tingkat ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak yang membutuhkan tanah tidak masuk akal, tidak selalu setuju. Konflik muncul antara otoritas yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah karena pemegang hak atas tanah tidak mau melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah mereka demi kepentingan otoritas yang membutuhkan tanah. Hal ini mungkin saja terjadi. (Wulandari, 2018).

Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang disajikan dalam bentuk daftar lokasi rencana pembangunan sementara yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan, akan digunakan sebagai bahan untuk menyelenggarakan konsultasi publik. Kelompok penyusun Dinas Pekerjaan Umum bersama dengan pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat yang terkena dampak, di mana hasil kesepakatan lokasi rencana pembangunan pada dengar pendapat publik ini akan disajikan dalam berita kesepakatan. Namun, pada saat dilakukan dengar pendapat publik, terdapat pertentangan terhadap lokasi rencana pembangunan antara pihak yang berwenang dan masyarakat yang terkena dampak atau perwakilannya, dalam hal ini dengar pendapat publik akan dilakukan kembali dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penandatanganan protokol kesepakatan (pasal 16 - pasal 19 UU No. 2 tahun 2012). Hasil dari diskusi pemilihan ulang ini juga harus disajikan dalam berita acara. Jika, setelah konsultasi publik, masih ada keberatan terhadap lokasi rencana pembangunan, tim akan memberitahukan kepada gubernur tentang keberatan tersebut melalui tim persiapan, dalam hal ini gubernur kabupaten membentuk Tim Kajian Keberatan. Kelompok penelitian akan menyelesaikan penyelidikan keberatan investasi atas rencana pembangunan sesuai rencana.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Kajian Keberatan, gubernur daerah menyiapkan surat yang menyetujui atau menolak keberatan terhadap lokasi rencana pembangunan, di mana surat ini disampaikan kepada pihak yang meminta tanah dan pihak yang keberatan. Jika pemilik tanah menerima keberatan mengenai lokasi rencana

pembangunan, ia mengeluarkan perintah untuk memenuhi keberatan tersebut, dan pihak yang mengajukan klaim atas tanah tersebut membatalkan rencana induk atau memindahkan tanah tersebut ke lokasi lain. Setelah menolak keberatan dari orang yang mengajukan keberatan atas lokasi pembangunan yang direncanakan atau menerima audiensi publik, gubernur daerah juga mengeluarkan perintah yang menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Tahapan terakhir adalah evaluasi yang berguna untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan yang di dapat dan apa yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi ini dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya. (Cangara, 2014). Dalam penyerahan hasil dan evaluasi pemerintah daerah provinsi Riau terlibat dikarenakan perpindahan aset warga negara Indonesia pada suatu daerah berpindah ke PUPR. Tetapi khusus ditahapan evaluasi tidak semata-mata melibatkan pemerintah daerah tergantung dari kebutuhan kementerian itu sendiri.

## KESIMPULAN

Perencanaan komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dengan menggunakan aturan-aturan pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden dan Ketetapan Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan dan pembangunan jalan tol telah sesuai diterapkan. Pada pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi sesuai dengan tahapan oleh Hafied Cangara. Adapun perencanaan komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di bawah wewenang Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Provinsi Riau ialah : Menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Melaksanakan sosialisasi, Melaksanakan Pendataan Awal, Melaksanakan Konsultasi Publik, Menyiapkan Penetapan Lokasi dan Mengumumkan Penetapan Lokasi (Penlok). Perencanaan Komunikasi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau masih secara dasarnya setara dengan konsep perencanaan komunikasi oleh Hafied Cangara hanya saja tahapan-tahapan yang ada selain peran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, instansi Kementerian Pekerjaan Umum juga ikut berperan karena instansi Pekerjaan Umum setiap daerah tetap berada di bawah struktur tugas pokok pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aw, Suranto. (2019). *Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta: Pena Pressindo
- Cangara, Hafied. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cutlip, M.Scott. Center, Allen. H. Broom, M.Glen. (2016). *Effective Public Relations* Ed.9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendy, Onong Uchjana. (1977). *Human Relations dan Public Relations Dalam Management*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kasali, Rhenald. (2003). *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Korten, C. David. (2010). *People-Centered Development: Reflections on Development Theory and Method*. Paper. Manila.
- Kunczik, Michael. (1984). *Communication and Social Change*. Bonn: Friedrich Ebert Stiftung.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publichuo*, 4(1), 19.
- Mengie, S. W. (2021). Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(3)..
- Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Ruslan, Rusady. (1999). *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Trisna Wulandari, D. (2018). *Proses Komunikasi Tim Pengadaan Tanah Cipl Dalam Program Sosialisasi Pembebasan Lahan Jalan Hambatan Tol* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2023). Strengthening Community Social Capital In Peatland Management. *Sosiohumaniora*, 25(1).
- Zulkarnaini, Z., & Gevisioner, G. Differences Perception And Interest In Peatland Management Policy. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 65-72.